

**RELEVANSI PARADIGMA
EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
DENGAN SISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

ABDUL HAFIT
NIM : D01303213

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS T-2010 256 PAI	No. REG : T-2010/PAI/256 ASAL BUKU : TANGGAL :



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
AGUSTUS 2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : **ABDUL HAFIDZ**

NIM : **D01303213**

Judul : **RELEVANSI PARADIGMA EPISTEMOLOGI
PENDIDIKAN ISLAM DENGAN SISTEM
PENDIDIKAN DI INDONESIA**

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 14 Agustus 2010

Pembimbing,



DR. H. Abd. Chayyi Fanany, M.Si.
NIP. 194612061966051001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Abdul Hafit ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 31 Agustus 2010

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



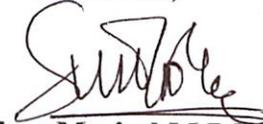
DR. Nur Hamim, M. Ag
NIP. 196203121991031002

Ketua,



DR. H. Abd. Chayyi Fanany, M.Si.
NIP. 194612061966051001

Sekretaris,



Sulthon Mas'ud, M.Pd.I
NIP. 197309102007011017

Penguji I,



Dr. H.A. Muhibbin Zuhri, M.Ag
NIP. 19720111996031001

Penguji II,



Drs. H. Sholehan, M.Ag
NIP. 195911041991031002

ABSTRAK

Abdul Hafidz. 2010. *Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia*.

Pembimbing: DR. H. Abd.Chayyi Fanany, M.Si.

Aktualisasi paradigma epistemologi pendidikan Islam dianggap urgen mengingat fakta pendidikan Islam saat ini telah banyak mengalami "infeksi" dari ideologi lain. Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk mengembalikan pendidikan Islam pada orisinalitas epistemologisnya, sekaligus mengupayakan untuk mensterilkan kembali pengaruh-pengaruh ideologi lain yang merancukan epistemologi pendidikan Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul *Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana paradigma epistemologi pendidikan Islam sebagai sebuah bangunan ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan di Indonesia, serta berupaya mencari relevansi paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik *dokumenter* dan data-datanya diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan tentang epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif analitis kritis* dan metode *komparatif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh beberapa temuan yang berdasarkan rumusan masalah bahwa: (a) Paradigma epistemologi pendidikan Islam adalah kerangka konseptual tentang pendidikan Islam sebagai sebuah bangunan ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengkaji bagaimana cara mengetahui serta mempelajari asal-usul pendidikan Islam, hakikat, sasaran dan metode membangun pendidikan Islam serta bagaimana kebenaran pendidikan Islam; (b) Sistem pendidikan di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; (c) Paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia memiliki relevansi, artinya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dan substansial. Meskipun terdapat perbedaan, namun masih bisa ditarik sisi kesamaannya.

Key word: Epistemologi Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan di Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II PARADIGMA EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam.....	15
B. Unsur-unsur Epistemologi Pendidikan Islam	20
1. Hakikat Pendidikan Islam.....	20
2. Asal-usul dan Sumber Pendidikan Islam	33
3. Sasaran dan Tujuan Pendidikan Islam	35
4. Kebenaran dalam Pendidikan Islam.....	40
5. Metode Epistemologi Pendidikan Islam	42

a. Metode Rasional	43
b. Metode Intuitif	45
c. Metode Dialogis	49
d. Metode Komparatif	50
e. Metode Kritik	53

BAB III SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Landasan Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia	58
B. Visi, Misi, dan Strategi Pendidikan di Indonesia	60
C. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia	63
D. Kurikulum Pendidikan di Indonesia	65

BAB IV ANALISIS TERHADAP RELEVANSI PARADIGMA EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Analisis Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam	69
B. Analisis Sistem Pendidikan di Indonesia	77
C. Analisis Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94

Daftar Pustaka

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki misi pendidikan yang berfungsi sebagai pencerahan kepada segenap manusia. Dengan diturunkannya al-Qur'ān ke muka bumi diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi manusia (*hudan li al-nās*) untuk mengetahui segala sesuatu melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muḥammad SAW, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah [2]: 185, dan Q.S. al-Naḥl [16]: 44.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...¹

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)...”¹

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'ān, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”²

Dua ayat di atas menegaskan, bahwa al-Qur'ān dan al-Ḥadīth yang *nota bene* merupakan sumber pokok ajaran Islam yang berisi suatu konsep, ide, nilai

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 2000), h. 425.

²Ibid., h. 408.

dan norma-norma kependidikan, dalam tataran konsep memunculkan sebuah ilmu pendidikan yang Islami. Perspektif ini bersifat filosofis karena menganalisis langsung dari sumber pokok ajaran Islam, sehingga kemudian melahirkan suatu ilmu yang dikenal dengan istilah filsafat pendidikan Islam yang di dalamnya juga membahas tentang ilmu pendidikan Islam, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.³

Kajian filsafat pendidikan Islam – yang di dalamnya juga membahas Ilmu pendidikan (agama) Islam – dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang upaya pengembangan secara sistematis tentang proses pendidikan ajaran Islam melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan agar Islam dapat dijadikan sebagai panutan hidup (*way of life*). Perspektif ini bersifat pengembangan konsep dan praktik pendidikan, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu ilmu pendidikan Islam yang bersifat teoritis dan praktis.⁴

Ilmu pendidikan Islam sebagai ilmu murni dan sekaligus ilmu terapan merupakan titik temu antara norma dan moral Islam, yang menghendaki cara berpikir yang selalu berorientasi pada proses dan memihak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam bisa dinilai sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.⁵

³A. Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 5.

⁴M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 12.

⁵Suatu objek studi dapat dikatakan mandiri apabila memiliki ciri-ciri umum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu: a) memiliki objek yang eksplisit, b) memiliki metodologi pengembangan, c) memiliki struktur dan sistematika yang eksplisit pula, dan d) memiliki evidensi empirik. Lihat: Noeng

Selain itu, pendidikan Islam memiliki landasan nilai-nilai yang bersifat ideal (*ideal core values*) dan berlaku universal (*general pattern*). Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan hidup yang mendasari seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang Islami, yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transendental, eternal, mondial, dan universal.

Menurut Hasan Langgulung, ada lima sumber dasar nilai yang diakui dalam Islam, yaitu al-Qur'ān dan al-Sunnah sebagai sumber pokok, kemudian *qiyās*, kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan *naṣ*, *ijmā'* ulama dan ahli pikir Islam yang sesuai dengan sumber dasar Islam.⁶ Kelima dasar nilai inilah yang dinilai sebagai sumber ilmu pengetahuan Islam, termasuk ilmu pendidikan

Islam.

Apa yang disajikan di atas sebenarnya telah menyentuh pada ranah paradigma pendidikan, atau lebih tepatnya paradigma epistemologis pendidikan Islam. Hal ini sengaja dikemukakan mengingat saat ini perbincangan tentang paradigma epistemologis pendidikan Islam sedang hangat dibicarakan. Isu islamisasi sains di satu sisi dinilai positif oleh sebagian orang, namun juga dinilai negatif karena merencanakan epistemologi pendidikan Islam. Seperti yang dinyatakan oleh Hasan Langgulung dalam salah satu kertas kerjanya, bahwa:

... adalah keliru jika kita mengkaji pendidikan Islam hanya dari lembaga-lembaga pendidikan yang muncul dalam sejarah Islam, dari

Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Serasin, 1993), h. 15. Dengan redaksi yang berbeda, lihat juga: RB. Kasihadi, 1985, h. 16.

⁶Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 35.

kurikulum, apalagi hanya dari metode mengajar, dan melepaskan masalah ideologi Islam. Karena bagaimana pun, Islam sebenarnya telah membawa ideologi tertentu yang sedikit banyak berbeda dengan ideologi lain. Ideologi itu terpantul dalam pendidikan Islam, yang kalau tidak kita pahami, niscaya mustahil memahami pendidikan Islam.⁷

Ungkapan di atas menjelaskan kedudukan dan fungsi ideologi atau paradigma dalam pendidikan Islam. Ideologi atau paradigma pendidikan Islam merupakan gambaran utuh tentang ke-Tuhan-an, alam semesta, dan tentang manusia yang merupakan sumber penisbahan segala cabang, perincian, serta dikaitkan dengan semua teori pendidikan Islam, sehingga semuanya berada di bawah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menegaskan kembali paradigma yang diperlukan untuk mengembangkan pendidikan Islam.⁸

Upaya di atas sebenarnya bisa dilakukan dengan cara membangun epistemologinya. Epistemologi pendidikan Islam itu perlu dirumuskan secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Syarat-syarat itu merupakan kunci dalam memasuki wilayah pendidikan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan segala sarana dan potensi yang dimiliki para ilmuwan atau pemikir.⁹

⁷Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), Cet. 3, h. 181.

⁸Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam; Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 3.

⁹Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 249-250.

Memang dalam faktanya, pengaruh pendidikan Barat mampu menembus pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan Islam mengalami banyak kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, para pakar pendidikan Islam dan para pengambil kebijakan dalam pendidikan Islam melakukan upaya-upaya yang mengarah pada epistemologi pendidikan Islam.

Aktualisasi paradigma epistemologi pendidikan Islam dianggap urgen mengingat fakta pendidikan Islam saat ini yang telah banyak mengalami "infeksi" dari ideologi lain. Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk mengembalikan pendidikan Islam pada orisinalitas epistemologisnya, sekaligus mengupayakan untuk mensterilkan kembali pengaruh-pengaruh ideologi lain yang merancukan epistemologi pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang paradigma epistemologi pendidikan Islam, dengan mengangkat judul kajian: "Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa garis besar rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma epistemologi pendidikan Islam?

2. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui paradigma epistemologi pendidikan Islam.
2. Untuk mengetahui sistem pendidikan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentunya ada beberapa kegunaan yang ingin diraih. Nilai guna yang bisa diambil dari kajian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Kajian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mempertajam daya kritis dan nalar terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan paradigma pendidikan, terutama epistemologi pendidikan Islam;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada program studi kependidikan Islam di IAIN Sunan

Ampel Surabaya. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan kajian lebih lanjut tentang permasalahan di atas.

2. Kegunaan Praktis:

a. Sebagai upaya untuk memberikan penyadaran dan pemahaman kepada para praktisi pendidikan tentang bagaimana sebenarnya paradigma epistemologi pendidikan Islam kaitannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga mereka dapat memahami hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan Nasional.

b. Untuk memberikan pertimbangan kepada para *decision makers* di lembaga-lembaga pendidikan Islam, agar senantiasa tetap mengaktualisasikan paradigma pendidikan Islam dalam rangka memantapkan arah pendidikannya.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan, sebagai upaya antisipasi terjadinya *mis-understanding* dalam memahaminya.

1. Relevansi, yaitu kait-mengait, bersangkutan-paut, hubungan yang sesuai.¹⁰
2. Paradigma Epistemologi. Paradigma adalah kerangka konseptual atau model yang dengannya seorang ilmuwan bekerja.¹¹ Secara filosofis, epistemologi

¹⁰Inda Putri Manroe, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Greisinda Press, t.th), h. 360.

¹¹Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 38.

adalah mempertanyakan tentang bagaimana cara mengetahui sesuatu;¹² atau mempelajari asal-usul, hakikat, sasaran dan tujuan, kebenaran ilmu pengetahuan dan metode sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan keyakinan.¹³

3. Pendidikan Islam. Yakni pendidikan yang dilaksanakan oleh orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal.¹⁴
4. Sistem Pendidikan Indonesia. Yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵

Berangkat dari definisi di atas, maka yang dimaksud dengan "Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia" dalam kajian ini adalah hubungan kesesuaian antara kerangka konseptual tentang bagaimana konsep pendidikan Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹²Ibid., h. 39.

¹³Omar Hasan Kasule, *Epistemologi Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan pada Universitas Islam: Epistemologi Islam dan Proyek Kurikulum*, Makalah tidak diterbitkan: Dipresentasikan dalam Seminar Internasional di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 7 Februari 2009.

¹⁴M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 32.

¹⁵Yudrik Yahya, *Wawasan Kependidikan*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Diknas, 2004), h. 42.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, kebutuhan akan metode merupakan suatu keniscayaan, bahkan menurut Sumadi Suryabrata, metode merupakan suatu hal yang sangat esensial.¹⁶ Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan dengan jenis dan sifat penelitian agar diperoleh hasil yang diinginkan, sebagaimana berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenisnya adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terlebih dahulu.¹⁷ Bahan pustaka yang dimaksudkan di sini adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan, yaitu buku-buku yang membahas tentang paradigma epistemologi pendidikan Islam dan bahan pustaka yang mengkaji tentang sistem pendidikan di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dari kajian pustaka ini tentunya tidak bisa lepas dari sumber-sumber yang bersifat kepustakaan. Karenanya, dalam kajian ini penulis menggunakan sumber data yang bersifat primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 1-2.

¹⁷Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1982), h. 72.

Sumber data primer yang digunakan dalam rangka mengeksplorasi data tentang paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sitem pendidikan di Indonesia adalah:

- 1) Epistemologi Pendidikan Islam, karya Mujamil Qomar.
- 2) Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, karya Tedi Priatna.
- 3) Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, karya H. Muhaimin.
- 4) *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas*, karya Wan Mohd Wan Daud, terj. Hamid Fahmi et.al., “Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas”.
- 5) Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005.
- 7) Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional, karya Anwar Arifin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang melengkapi sumber data primer. Dalam kajian ini, ada beberapa buku sekunder yang bisa dijadikan sebagai penunjang, yaitu:

- 1) Membumikan Pendidikan Nilai, karya Zaim Elmubarak.

- 2) *Asas-asas Pendidikan Islam*, karya Hasan Langgulung
- 3) *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, karya Muhaimin dan Abdul Mujib
- 4) *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangannya*, karya Jalaluddin dan Usman Said.
- 5) *Epistemologi Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan pada Universitas Islam: Epistemologi Islam dan Proyek Kurikulum*, karya Omar Hasan Kasule.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang ingin dikumpulkan bersifat literer, maka peneliti menggunakan teknik dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dalam kajian ini, peneliti hanya menggunakan dokumen yang berupa buku, majalah, makalah, internet, atau lainnya sebagai sumber informasi.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut melalui metode-metode berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis Kritis

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Jujun S. Suriasumantri,¹⁹ yaitu *deskriptif analitis kritis*. Teknik kajian analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan primer yang lain dalam rangka melakukan studi perbandingan, hubungan dan pengembangan model. Menurutnya, metode ini bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu “ruang lingkup permasalahan” yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif digunakan untuk dapat menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Atau membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, group/negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide.²⁰

Penggunaan metode ini dianggap perlu, mengingat inti persoalan dalam kajian ini adalah ingin mengetahui relevansi antara satu

¹⁹Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah; Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa bekerjasama dengan Pusjarlit Press, 1998), h. 41-61.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, op.cit., h. 267.

dengan lainnya. Untuk mengetahui relevansi itu, maka dua variabel tersebut harus dipertemukan secara konfrontatif. Dengan demikian, maka akan ditemukan segi-segi persamaan dan perbedaannya. Dari situlah nanti akan bisa dinilai, apakah dua hal itu relevan atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teoritis tentang Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam. Bab ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam tentang pengertian paradigma epistemologi pendidikan Islam. Dalam pengertian tersebut, penulis akan memaparkan secara agak panjang lebar definisi dari masing-masing istilah paradigma, epistemologi, dan pendidikan Islam, kemudian melakukan sintesa terhadap ketiga term tersebut untuk menemukan makna yang sebenarnya tentang paradigma epistemologi pendidikan Islam. Selanjutnya, dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang unsur-unsur epistemologi pendidikan Islam, seperti hakikat pendidikan Islam, asal usul pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, sasaran pendidikan dan tujuan pendidikan Islam, kebenaran dalam pendidikan Islam dan metode- metode epistemologi pendidikan Islam.

Pada Bab Ketiga juga berisi landasan teoritis, yaitu tentang Sistem Pendidikan di Indonesia. Bab ini menyajikan tentang hal ihwal sistem pendidikan Nasional, yang meliputi: landasan pelaksanaan pendidikan Nasional, tujuan pendidikan Nasional, sasaran pendidikan Nasional, dan kurikulum pendidikan Nasional.

Bab Keempat merupakan bagian paling penting dalam penulisan ini, yaitu berisi tentang Analisis terhadap Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia. Dalam bab ini peneliti akan menitikberatkan analisisnya pada segi-segi relevansi antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Bab Kelima merupakan Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.



BAB II

PARADIGMA EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam

Paradigma¹ merupakan suatu kerangka konseptual atau model yang dengannya seorang ilmuwan bekerja.² Sedangkan Salim, yang mengacu padan pandangan Guba, Denzin dan Lincoln menyimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun tindakan-tindakan kita baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang ilmu pengetahuan ilmiah paradigma didefinisikan sebagai sejumlah perangkat keyakinan dasar yang digunakan untuk mengungkapkan hakikat ilmu pengetahuan yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya.⁴

Sementara dalam komunitas Sosiologi, definisi paradigma yang banyak digunakan mengacu pada definisi George Ritzer. Menurut Ritzer, paradigma merupakan gambaran fundamental tentang pokok permasalahan dalam suatu ilmu

¹Paradigma berasal dari bahasa Yunani *para deigma*, dari *para* (di samping; di sebelah) dan *deigma* (memperlihatkan: yang berarti; model, contoh, arketipe, ideal). Istilah “paradigma” semakin penting karena karya ilmuan Amerika, Thomas Khun. Menurut Khun, dalam bukunya *The Struktur Of Scientific Revolution*, seorang ilmuan selalu bekerja dengan paradigma tertentu. Paradigma itu memungkinkan sang ilmuan untuk memecahkan kesulitan yang muncul dalam rangka ilmunya. Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 779.

²Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 38.

³<http://e-bookmarket.com/doc/maksud-paradigma.htm/20/05/2008/16:23>.

⁴Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Belukar, 2008), h. 88.

pengetahuan. Paradigma membantu memberikan definisi tentang apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus dikemukakan, bagaimana pertanyaan itu dikemukakan, dan peraturan apa yang harus dipatuhi dalam menginterpretasi jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan suatu konsensus yang paling luas dalam suatu ilmu pengetahuan dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah (subkomunitas) dari yang lain. Paradigma memasukkan, mendefinisikan, dan menghubungkan eksemplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya.⁵

Menurut pendapat penulis, definisi paradigma yang dikemukakan Ritzer tersebut mengandung tiga asumsi yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ini dapat dilihat dari pernyataan: “paradigma membantu memberikan definisi tentang apa yang harus dipelajari (asumsi ontologi), pertanyaan apa yang harus dikemukakan (asumsi epistemologi), bagaimana pertanyaan itu dikemukakan, dan peraturan apa yang harus dipatuhi dalam menginterpretasikan jawaban yang diperoleh (asumsi metodologi). Dengan demikian definisi paradigma Ritzer mengandung tiga asumsi mendasar yang sama dengan definisi paradigma dari Guba, Denzin dan Lincoln, yaitu asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Sedangkan istilah epistemologi berasal dari Bahasa Yunani *episteme* dari kata kerja *epistamai* yang berarti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan⁶

⁵Ibid.

⁶Jadi secara harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. *Episteme* bukanlah satu-satunya kata dalam Bahasa Yunani yang mempunyai arti pengetahuan, sebab dalam Bahasa Yunani terdapat kata “*gnosis*” yang berarti juga pengetahuan. J.F. Ferrier merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah epistemologi disamping *Gnoseologi* untuk merujuk arti pengetahuan. Lihat: J.Sudarminta, *Epistemologi Dasar*:

dan *logos* berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan.⁷ Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan,⁸ dan epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis.⁹ Bertolak dari beberapa pengertian di atas, aspek-aspek yang menjadi cakupan epistemologi atau ruang lingkungannya meliputi: hakikat, sumber dan validitas pengetahuan.

Selanjutnya, objek epistemologi menurut Jujun S. Suriasumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan.¹⁰

Jacques Maritan mengatakan bahwa tujuan epistemologi bukanlah hal utama menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu.¹¹ Sedangkan landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar.

Pengantar Filsafat Pengetahuan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 18; Imam Wahyudi, *Pengantar Epistemologi* (Yogyakarta: Filsafat UGM, 2007), h. 2.

⁷Rizal Mustansyir, Misnal Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.16; Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 87.

⁸Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 137; Juhaya S. Praja, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, op.cit., h. 87.

⁹Evaluatif berarti bersifat menilai, ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara nalar. Normatif berarti, menentukan norma atau tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Sedangkan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui. Lihat: J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, op.cit., h.18-19.

¹⁰Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, op.cit., h. 8.

¹¹Ibid.

Dari pengertian, ruang lingkup, objek, dan landasan epistemologi ini, dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh.

Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh orang dewasa Muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan kemampuan dasar (*fitrah*) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal.¹² Ini artinya, pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani-rohani menurut hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut Islam, yang berarti menitik-beratkan kepada bimbingan jasmani-rohani berdasarkan ajaran Islam dalam membentuk akhlak mulia.¹³

Menurut Zuhairini, pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikirkan, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴ Sedangkan menurut Sayed Muhammad Naquib al-Attas, sebagaimana dikutip oleh Hamdani Ihsan, menyatakan bahwa pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar

¹²H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 32.

¹³Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, (Jogjakarta:UGM Press Jawa Timur, 2004), h. 49.

¹⁴Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.152.

dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, tampak sekali penekanan pendidikan Islam kepada pembentukan kepribadian, akhlak, mengembangkan semua potensi manusia (*fitrah*) secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, sehingga melalui pendidikan Islam tersebut diharapkan dapat menjadi muslim yang baik, memiliki pola pikir logis-kritis, beriman, bertaqwa, berguna bagi diri dan lingkungannya, dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian – berdasarkan berbagai definisi tentang paradigma epistologi dan pendidikan Islam –, maka dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan "Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam" adalah kerangka konseptual tentang bagaimana cara, proses, dan prosedur untuk memperoleh, mengetahui serta mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul, hakikat, sasaran dan metode pendidikan Islam dengan tujuan mendapatkan keyakinan serta kebenaran dalam pendidikan.

¹⁵Hamdani Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h.16.

B. Unsur-unsur Epistemologi Pendidikan Islam

Sejalan dengan pengertian tentang epistemologi pendidikan di atas, maka yang akan menjadi pokok sajian selanjutnya adalah unsur-unsur yang membangun epistemologi pendidikan Islam yang meliputi hakikat, asal-usul, dasar, dan sasaran pendidikan Islam.

1. Hakikat Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, terminologi pendidikan Islam dikenal sebagai *al-tarbiyyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'zib*. Masing-masing istilah ini memiliki karakteristik makna di samping mempunyai kesesuaian dalam pengertian pendidikan. Di samping itu juga terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa seperti kata *tabyin*, dan *taaris*, akan tetapi ketiga istilah tersebut di atas dianggap cukup representatif dalam rangka mempelajari makna dasar pendidikan Islam.¹⁶

Berikut penjelasan tentang term *al-tarbiyyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*, tersebut:

a. *al-Tarbiyyah*

Istilah *tarbiyyah* terderivasi dari kata *rabā-yarbū* yang berarti bertambah dan tumbuh; dan kata *rabba-yarubbu-rabban* yang berarti mengasuh, memimpin.¹⁷ Menurut al-Raghīb al-Asfihānī, kata *tarbiyah* merupakan akar kata *rabb*, yang terdiri dari huruf *ra* dan *ba* yang berarti,

¹⁶Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik, Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), h. 38.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-ndonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 136-137.

menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga mengantarkannya kepada kesempurnaan.¹⁸

Dalam leksikologi al-Qur'an tidak ditemukan istilah *al-tarbiyah*, namun ada istilah yang senada dengan kata *al-tarbiyah* yaitu *al-rabb*, *rabbayani*, *nurabbi*, *ribbiyyun*, *rabbani*, dan dalam hadits Nabi dipergunakan *rabbani*.¹⁹ Di dalam al-Qur'an, di antara ayat-ayat yang berkenaan dengan kata *al-tarbiyah* adalah sebagai berikut:

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا²⁰

“dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَكَلِّمْنَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ²²

“Fir'aun menjawab: ‘Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.’”²³

Selain ayat-ayat di atas, yang berkaitan dengan pengertian *tarbiyah* juga terdapat pada Q.S. al-'Alaq [96] ayat 1-5:

¹⁸Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2004), h 147-148.

¹⁹Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, (Bandung: Irigenda Karya, 1993), h. 128.

²⁰al-Qur'an, 17 (al-Isrā'), 24.

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 428.

²²al-Qur'an, 26 (al-Shu'ra'), 18.

²³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 574.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”²⁴

Berikut ini beberapa definisi para tokoh tentang istilah *tarbiyah* dari segi etimologi dan terminologi:

1) Secara Etimologis

Menurut Syekh Muhammad al-Naquib al-Attas, apabila istilah *al-tarbiyah* diidentikkan dengan bentuk *māḍi*-nya yang berupa *rabbayāni* sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Isrā` [17]: 24 (*kamā rabbayānī ṣaghīrā*) dan bentuk *muḍāri*'-nya, *nurabbi*, sebagaimana dalam Q.S. al-Shu'arā` [26]: 18 (*alam nurabbika fī nā walīdā*), maka kata *al-tarbiyah* mempunyai arti mengasuh, merangsang, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, mem-pertumbuhkan, memproduksi dan menjinakkan. Namun dari konteks kalimatnya, surat al-Shu'arā` tersebut hanya mencakup aspek jasmani saja sedangkan dalam surat al-Isrā` mencakup aspek jasmani dan rohani.

²⁴Ibid., 1079.

Sementara Sayyid Quṭb menafsirkan kata *rabbayani* dengan pemeliharaan anak serta menumbuhkan kematangan sikap mentalnya.²⁵ Sedangkan dari surat al-Isrā' [17]: 24, pengertian *al-tarbiyah* (padanan dari *rabbaniyin* dan *ribbiyun*) dapat dipahami sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dan sikap pada anak didik yang mempunyai semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terwujud ketakwaan, budi pekerti dan pribadi yang luhur.²⁶

Menurut Zakiah Darajat,²⁷ kata kerja *rabb* yang berarti mendidik sudah dipergunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti di dalam al-Qur'ān dan Ḥadīth. Dalam bentuk kata benda, kata *rabb* ini digunakan juga untuk "Tuhan", karena Ia juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara dan mencipta. Sebagaimana dalam Q.S. Yūsuf [12]: 23, Q.S. al-Isrā' [17]: 24, dan Q.S. al-Shu'arā' [26]: 18.

Menurut Abū al-A'lā al-Mawdudī, sebagaimana dikutip Moh. Shofan menyatakan bahwa arti kata *rabb* tidak hanya dibatasi dalam makna memelihara dan membimbing, tetapi jauh lebih luas, yaitu memelihara dan menjamin atau memenuhi kebutuhan yang dipeliharanya; membimbing dan mengawasi serta memperbaikinya dalam segala hal; pemimpin yang menjadi penggerak utamanya secara keseluruhan;

²⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilal al-Qur'an*, Juz XV, (Libanon: Dar al-Ihya, t.th), h.15.

²⁶Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 130.

²⁷Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 25-26.

pimpinan yang diakui kekuasaannya, berwibawa dan semua perintahnya diindahkan; dan raja atau pemilik.²⁸

Dari sini tergambar bahwa kata *rabb* atau *tarbiyah* mengandung cukup banyak makna yang berorientasi kepada peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan. Dengan demikian kata *tarbiyah* mempunyai arti yang sangat luas dan bermacam-macam dalam penggunaannya, dan dapat diartikan menjadi makna “pendidikan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pengembangan, penciptaan dan keagungan yang kesemuanya ini menuju dalam rangka kesempurnaan sesuatu sesuai dengan kedudukannya.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis semantik tadi dapat dilihat bahwa pandangan dasar Islam yang optimis tentang manusia adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi kebaikan yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Potensi kebaikan itu bersumber dari kejadian asal manusia yang suci, yaitu fitrahnya. Pada tahap berikutnya fitrah itu membuat manusia menjadi makhluk yang berkecenderungan suci, yaitu sifat yang *hanif*. Oleh karena itu pangkal dari semua usaha pendidikan Islam adalah menumbuhkan pada anak akan makna dan tujuan hidupnya sendiri, yaitu kebenaran Ilahi. Dari sinilah kita dapat memahami firman Allah SWT dalam Q.S. al-Rūm [30]:30:

²⁸Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, op.cit., h. 40.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”²⁹

2) Secara Terminologis

Secara terminologis, kata *al-tarbiyah* ternyata juga mengalami penafsiran-penafsiran, di antaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abd al-Fatah Jalal menyatakan bahwa *tarbiyah* adalah proses persiapan dan pemeliharaan pada masa kanak-kanak di dalam keluarga dengan mengacu pada surat al-Isra’: 24 dan as-Syuara’: 18.³⁰ Sedangkan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi mendefinisikan *al-tarbiyah* dengan yang berarti proses penyampaian sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara bertahap (*tabligh al-Shai` ilā kamālih Shai`an fa Shai`an*).³¹

Mustafa al-Ghalayani mengartikan *al-tarbiyah* dengan penanaman etika yang mulia pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara

²⁹Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 645.

³⁰Abd al-Fatah Jalal, *Min al-Uṣūl al-Tarbawiyah fī al-Islām*, terj. Herry Noer Ali, “Azaz-Azaz Pendidikan Islam”, (Bandung: Dipenogoro, 1998).

³¹Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsīr Maḥāsīn al-Ta`wīl*, Juz I, (Libanon: Dār al-Ihyā’, t.th), h. 8.

memberi petunjuk dan nasehat, sehingga ia memiliki kompetensi-kompetensi jiwa yang mantap yang dapat membawa sifat-sifat baik-baik, cinta dan kreasi, dan berguna bagi tanah air.³²

Sedangkan Mustafā al-Maraghī membagi makna *tarbiyah* sebagai berikut: (a) *Tarbiyah Khalqiyah*, yaitu pembinaan dan pengembangan jasad, jiwa dan akal dengan berbagai petunjuk; (b) *Tarbiyah Diniyah Ta'dibiyah*, pembinaan jiwa dengan wahyu untuk kesempurnaan akal dan kesucian jiwa.³³

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-tarbiyah* adalah: *Pertama*, pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target. *Kedua*, pendidik yang sebenarnya adalah Allah, karena Dialah yang menciptakan fitrah dan bakat manusia, dan Dialah yang membuat dan memberlakukan hukum-hukum perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat itu berinteraksi. *Ketiga*, pendidikan menghendaki penyusunan langkah-langkah sistematis yang harus didahului secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

b. *al-Ta'līm*

³²Mustafā al-Ghalayānī, *'Idat al-Nāshī'īn*, (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Nabhan, t.th), h. 185.

³³Mustafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, Juz I, (Libanon: Dār al-Ihyā', t.th.), h. 30.

Secara etimologis, kata *ta'lim* berasal dari kata kerja *'allama* yang berarti “mengajar”. Kata *'allama* memberi pengertian sekedar memberi tahu (*transfer of knowledge*), tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan.³⁴

Secara terminologis, pengertian *ta'lim* banyak didefinisikan oleh para tokoh pendidikan Islam. 'Abd al-Fatah Jalāl berpendapat bahwa proses *ta'lim* justru lebih universal dibandingkan dengan proses *tarbiyah*, karena *ta'lim* tidak berhenti pada pengetahuan yang lahiriyah, juga tidak sampai pada pengetahuan taklid. Akan tetapi *ta'lim* mencakup pula pengetahuan teoritis, mengulang kaji secara lisan dan menyuruh melaksanakan pengetahuan itu. Menurutnya, *ta'lim* mencakup pula aspek-aspek keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan serta pedoman berperilaku. Di samping itu, menurutnya *ta'lim* merupakan suatu proses pemberitahuan pengetahuan, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga terjadi *tazkiyah* (penyucian dan pembersihan) diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya yang tidak diketahuinya, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 30-34 dan Q.S. Yūnus [10]: 5.³⁵ Sedangkan menurut

³⁴Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, op.cit., h. 26.

³⁵Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, op. cit., h. 142-146.

Muhammad Aṭīyyah al-Abrashī, term *ta'lim* lebih khusus dibandingkan *al-tarbiyah*, karena *ta'lim* hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada tertentu saja. Sedangkan *al-tarbiyah* mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan.

Berdasarkan pandangan tokoh di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah *ta'lim* dalam konsep pendidikan Islam memiliki makna; *Pertama*, proses pembelajaran secara terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati sampai akhir usia.³⁶ *Kedua*, proses *ta'lim* tidak saja terhenti pada pencapaian pengetahuan dalam wilayah (domain) kognisi semata, melainkan terus menjangkau psikomotor dan afeksi.

Dengan demikian, *ta'lim* dalam kerangka pendidikan tidak saja menjangkau domain intelektual *an sich*, melainkan juga persoalan sikap moral dan perbuatan dari hasil proses belajar yang dijalaninya.

c. *al-Ta'dīb*

al-Ta'dīb merupakan salah satu konsep yang merujuk kepada hakikat dari inti makna pendidikan yang berasal dari kata *adab*, yang berarti memberi *adab*, mendidik dengan mengedepankan pembinaan moral. *Adab* dalam kehidupan sering diartikan sopan santun yang mencerminkan kepribadian, suatu pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-

³⁶al-Qur'ān, 16 (al-Nahl): 78.

kesalahan penilaian. Istilah ini dianggap merepresentasikan makna utama pendidikan Islam.

Menurut Naquib al-Attas, *al-Ta'dīb* lebih tepat digunakan karena tidak terlalu sempit dan tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi, *al-Ta'dīb* sudah meliputi kata *ta'lim* dan *tarbiyah* yang termasuk dalam arti pendidikan.

Adab merupakan disiplin tubuh, jiwa, dan ruh, disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah, pengenalan dan pengakuan akan realitas bahwa ilmu dan wujud ditata secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakiki itu serta kapasitas dan potensi jasmani, intelektual, maupun rohaninya.

Dalam *adab* akan tercermin keadilan dan kearifan, yang meliputi material dan spiritual. Karena *adab* menunjukkan pengenalan dan pengakuan akan kondisi kehidupan, kedudukan dan tempat yang tepat lagi layak, serta disiplin diri ketika berpartisipasi aktif dan sukarela dalam menjalankan peranannya. Penekanan adab mencakup amal dan ilmu sehingga mengkombinasikan ilmu dan amal serta adab secara harmonis.

Pendidikan dalam kenyataannya adalah *al-ta'dīb*, karena sebagaimana didefinisikan mencakup ilmu dan amal sekaligus.³⁷

Berdasarkan penjelasan tentang ketiga *term* tersebut, istilah *al-tarbiyah* yang paling cocok untuk dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan dan menyusun konsep pendidikan Islam dibandingkan istilah *al-ta'lim* (pengajaran, *instruction*) dan *al-ta'dīb* (pendidikan khusus), mengingat cakupan yang mencerminkannya lebih luas, dan bahkan istilah *al-tarbiyah* sekaligus memuat makna dan maksud yang dikandung kedua term tersebut.³⁸

Sedangkan hakikat pendidikan Islam itu sendiri, banyak didefinisikan oleh para tokoh pendidikan Islam sebagai berikut:

Omar Muḥammad al-Taumī al-Shaibānī, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai perubahan tingkah laku yang diusahakan melalui proses dan usaha pendidik, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar atau pada proses pendidik sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.³⁹

Sedangkan menurut H.M. Arifin, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan

³⁷Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, op.cit., h. 138.

³⁸Ibid., h. 139.

³⁹Omar Muḥammad al-Taumī al-Shaibānī, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1979), h. 398- 399.

membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁰

Selain itu, Muhaimin juga memberikan definisi bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu proses pembentukan dan menumbuhkembangkan kemampuan dasar yang dimiliki manusia menuju kesempurnaan hidup. Dalam Islam kesempurnaan hidup dapat diraih dengan menjalankan kehidupan ini secara seimbang. Karena itu, hakekat pendidikan adalah usaha mengarahkan dan membimbing fitrah anak didik menuju kesempurnaan.

Dengan demikian, yang menjadi pokok persoalan dalam pendidikan Islam itu sebenarnya bukanlah istilah yang digunakan, tetapi implementasi dari istilah itu sendiri, yaitu proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan serta pertumbuhan fitrah anak didik, agar ia dapat menyadari (*conscious*) akan jati dirinya sebagai hamba dan

⁴⁰H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Cet. II, h. 32.

⁴¹Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, op.cit., h. 136.

khalifah Allah untuk selanjutnya menuju kesempurnaan hidup (*insān kāmil*) dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya, apa ciri khusus pendidikan Islam? Azumardi Azra memberikan rumusan bahwa ciri pendidikan Islam adalah:

a. Penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah SWT. Sebagai ibadah maka dalam pencarian, pendidikan Islam sangat menekankan nilai-nilai akhlak. Dalam konteks ini maka kejujuran, sikap *tawaddu'*, menghormati sumber pengetahuan merupakan prinsip-prinsip penting yang perlu dipegangi oleh setiap pencari ilmu.

b. Pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam satu keberibadian.

c. Pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia.⁴²

Dari karakteristik di atas dapat dilihat adanya keseimbangan antara iman, ilmu dan amal, antara apa yang ada dalam pikiran dan aktualisasi kreatifitas nyata anak didik, dan juga adanya potensi pendidikan pembebas berupa penyaluran potensi manusia secara maksimal.

⁴²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 7.

2. Asal-usul dan Sumber Pendidikan Islam

Di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan (Islam) merupakan suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Memandang pentingnya aspek pendidikan terhadap manusia, maka perlu kiranya dalam setiap usaha pendidikan selayaknya kegiatan yang dilakukan didasarkan pada landasan yang berpijak pada nilai-nilai yang ideal. Dasar nilai-nilai ideal yang menjadi landasan dasar pendidikan Islam haruslah merupakan sumber kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung di dalamnya haruslah bersifat universal dan dapat dikonsumsi untuk seluruh aspek kehidupan manusia serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan yang berjalan.⁴³ Berkaitan dengan pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang Islami, yang merupakan nilai-nilai luhur bersifat transendental, eternal, dan universal.

Menurut Hasan Langgulung, ada lima sumber nilai yang diakui dalam Islam, yaitu al-Qur'ān dan Sunnah Nabi sebagai sumber pokok, *qiyās*, kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan *naş*, *ijmā'* ulama yang sesuai dengan sumber dasar Islam.⁴⁴ Sebagai sumber asal, al-Qur'ān memiliki

⁴³Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, op.cit., h. 144.

⁴⁴Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), h. 35.

prinsip-prinsip yang masih bersifat global (*ijmali*), sehingga dalam proses pelaksanaan pendidikan terbuka adanya ijtihad dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur'ān dan Sunnah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, *maṣlahah mursalah*, *istihsān*, dan *qiyās*.

Muhaimin membagi dasar pendidikan Islam menjadi dua bagian, yaitu: dasar ideal dan dasar operasional. Dasar ideal, yang dikutip dari Said Ismail Ali, ada enam macam yaitu: al-Qur'ān, Sunnah Nabi, *Qaul al-Ṣaḥabah*, kemaslahatan umat, nilai-nilai dan adat kebiasaan masyarakat serta hasil pemikiran para pemikir Islam.⁴⁵ Sedangkan dasar operasional pendidikan Islam terbentuk sebagai aktualisasi dari dasar ideal, mengutip pendapat Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan terbagi menjadi empat bagian yang paling dibutuhkan, yaitu dasar historis, dasar ini memberi kesiapan kepada peserta didik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, undang-undang, peraturan-peraturan, batas-batas dan sekaligus kekurangan-kekurangannya. Dasar sosial, yaitu dasar yang memberikan kerangka budaya yang pendidikannya itu bertolak dan bergerak, seperti memindah budaya, memilih dan mengembangkannya. Dasar psikologis, yaitu dasar yang memberi informasi tentang watak para pelajar, para guru, cara-cara terbaik dalam praktik,

⁴⁵Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, op.cit., h. 145.

pencapaian dan penilaian serta pengukuran secara bimbingan, dan yang terakhir dasar filosofis, dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya.⁴⁶

Dari uraian di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta hasil ijtihad. Di dalam sumber tersebut banyak nilai fundamental yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut adalah tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat dan *rahmatan li al-'ālamīn*.

3. Sasaran dan Tujuan Pendidikan Islam

Bila pendidikan dipandang sebagai proses, maka proses tersebut pastilah akan berakhir pada tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Sementara tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Nilai-nilai ideal yang hendak dicapai tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan dalam perencanaan kurikulum pendidikan sebagai dasar operasional pelaksanaan itu sendiri.

Sebelum sampai pada uraian tentang tujuan pendidikan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai fungsi tujuan pendidikan itu sendiri. Para ahli berpendapat bahwa fungsi tujuan pendidikan ada tiga yang semuanya masih

⁴⁶Ibid, h. 151-152.

bersifat normatif, yaitu: *Pertama*, memberikan arah bagi proses pendidikan. *Kedua*, memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan, karena pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasi pada anak didik. *Ketiga*, tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan.⁴⁷

Arah dari proses pendidikan harus jelas, agar pendidikan tidak mengalami sebuah deviasi sehingga tergelincir dari sasaran perencanaan yang semestinya. Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada pendidikan yang meliputi beberapa aspek, misalnya tentang tujuan dan tugas hidup manusia,⁴⁸ memperhatikan sifat-sifat dasar manusia yaitu konsep tentang manusia bahwa ia diciptakan sebagai khalifah⁴⁹ serta beribadah kepada-Nya,⁵⁰ penciptaan itu dibekali fitrah berupa akal dan agama⁵¹ sebatas kemampuan dan kapasitas ukuran yang ada, dan memenuhi tuntutan masyarakatnya.

Pendidikan Islam, sering dikatakan memiliki sasaran dan dimensi hidup, yaitu: penanaman rasa taqwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesamanya. Dalam bahasa al-Qur'ān, dimensi hidup ketuhanan ini juga disebut jiwa *rabbaniyah*⁵² atau biasa disebut *tauhid rububiyah*, suatu bentuk keyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta

17. ⁴⁷Hasan Langgulong, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h. 13-

⁴⁸al-Qur'ān, 3 (Āli Imrān): 191.

⁴⁹al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah): 30

⁵⁰al-Qur'ān, 51 (al-Zāriyat (51): 56

⁵¹al-Qur'ān, 30 (al-Rūm): 28 dan 30

⁵²al-Qur'ān, 3 (Āli Imrān): 79

dikendalikan oleh Allah yang Maha Esa.⁵³ Adapun wujud nyata substansi jiwa ketuhanan itu adalah nilai-nilai keagamaan yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Nilai-nilai keagamaan dimaksud adalah islam, iman, ihsan, taqwa, ikhlas, tawakal, syukur, sabar dan sebagainya. Sedangkan dimensi kemanusiaan yang harus ditanamkan adalah silaturrahi, persaudaraan, persamaan, adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, dermawan dan lain sebagainya. Dua dimensi yang memiliki nilai-nilai tersebut akan membentuk ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Dari penjelasan itulah dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan diciptakannya manusia di bumi ini. Tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam aspek pendidikan adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya.

Dalam hal inilah Quraish Shihab menyatakan:

“...manusia yang dibina, yang digambarkan al-Qur’ān adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal dan jiwa). Unsur-unsur itulah yang harus dibina dan dikembangkan. Pembinaan akalnya akan menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya akan menghasilkan kesucian dan etika. Sedangkan pembinaan jasmaninya akan menghasilkan keterampilan. Dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut terciptalah makhluk dwi dimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah *adab al-din* dan *adab al-dunya*”.⁵⁴

⁵³ *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2001), h. 15.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 173.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang integral dan berkeimbangan serta mencakup semua aspek kepribadian manusia. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh pendidikan Islam adalah: jasad, akal, akidah, emosi, estetika dan sosial. Karena itu, pendidikan Islam harus diarahkan untuk pengembangan aspek-aspek tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam ingin membentuk manusia yang menyadari dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahannya serta memperkaya diri dengan khazanah ilmu pengetahuan tanpa mengenal batas. Namun juga menyadari bahwa hakikat keseluruhan hidup dan pemilikan ilmu pengetahuan yang dimaksud tetap bersumber dan bermuara kepada Allah.

digilib.uinsby.ac.id Lebih rinci Muhaimin memberikan tiga fokus tentang tujuan pendidikan

Islam,⁵⁵ yaitu *pertama*, terbentuknya *insān kāmil* (manusia universal) yang mempunyai wajah-wajah *qur'ani* seperti wajah kekeluargaan, persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianisme, wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang kreatif, wajah yang monokotomis, yang menumbuhkan integralisme sistem Ilahi ke dalam sistem *insaniah* dan sistem *kauniyah*, wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan dan kearifan. *Kedua*, terciptanya insan *kaffah* yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah. *Ketiga*, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, serta sebagai *warathāt al-anbiyā`* dan memberikan bekal yang memadai dalam

⁵⁵Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya*, op.cit., h.164-166.

rangka pelaksanaan fungsi tersebut. Sehingga dalam menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam masa kini dan masa depan harus mengacu pada:

Pertama, realisasi dan pengembangan komponen manusia yang merupakan resultan dari dua komponen (materi dan immateri). Jadi pendidikan Islam harus dibangun di atas kesatuan (integrasi) antara pendidikan *qalbiyah* dan *aqliyah*, sehingga dapat menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Namun jika hal ini dipisah-pisahkan, maka manusia akan kehilangan keseimbangan dan tidak akan pernah menjadi pribadi yang sempurna (*insān kāmil*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pengembangan potensi karena (sesuai yang dijelaskan dalam al-Qur'ān) fungsi manusia di alam ini adalah sebagai *khalifah* dan *'abd*. Maka pendidikan Islam harus berupaya mengarah pada pengembangan potensi yang dimiliki manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk kongkrit, dalam arti berkemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan lingkungannya sebagai realisasi fungsi dan tujuan penciptaannya, baik sebagai *khalifah* maupun *'abd*.⁵⁶

Dapat kita pahami bahwa tujuan pendidikan itu merupakan keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspeknya. Sebab pendidikan adalah salah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk

⁵⁶Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 21-22.

memelihara kelangsungan hidupnya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.⁵⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia, karena pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi penerus yang mampu menentukan arah hidupnya.

Dalam konsepsi Islam, pendidikan berlangsung sepanjang hayat (*longlife education*). Oleh karena itu, tujuan akhir pendidikan harus terefleksi sepanjang kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam pada dasarnya sejajar dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang dipahami dari al-Qur'ān dan Sunnah Nabi. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Sedangkan secara praktis dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan (pendidikan) pribadi muslim pada setiap generasi.⁵⁸

4. Kebenaran dalam Pendidikan Islam

Kebenaran pendidikan dalam kajian epistemologi ditunjukkan pada *output* atau hasil seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan menurut objek forma, metode, dan sistem. Ini artinya hasil penyelenggaraan pendidikan berupa

⁵⁷Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, op.cit., h. 305.

⁵⁸Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 30.

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Sementara kebenaran pendidikan dapat diukur menurut standar keilmuan, yaitu keterpaduan antara “bentuk” (kebenaran bentuk) dan “materi” (kebenaran materi). Jika bentuk dan materi itu berpadu, maka pendidikan benar adanya. Kebenaran pertama dapat diukur dengan keberhasilan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan, sedangkan kebenaran materi dapat diukur dengan sejauh mana di dalam diri seseorang itu tumbuh subur potensi ilmu pengetahuan sehingga membentuk watak dan sikap ilmiah.⁵⁹

Secara realitas, kedua kebenaran tersebut dapat membentuk dua kategori, yaitu: *Pertama*, ada orang terdidik karena berhasil melulusi setiap kegiatan belajar menurut jenjang pendidikan sekolah, sehingga terbentuk di dalam dirinya watak dan sikap ilmiah. *Kedua*, ada yang terdidik karena menguasai ilmu pengetahuan tanpa melalui seluruh kegiatan belajar menurut jenjang pendidikan sekolah. *Ketiga*, ada pula yang meskipun bergelar sarjana bahkan profesor sekalipun, tetapi watak dan sikap ilmiah justru tidak tumbuh. Secara substansial, watak dan sikap ilmiah adalah ciri khas keterdidikan seseorang.⁶⁰

⁵⁹Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar. Ruzz Media, 2008), h. 128.

⁶⁰Ibid.

5. Metode Epistemologi Pendidikan Islam

Metode merupakan bagian integral dari epistemologi, karena epistemologi mencakup banyak pembahasan termasuk metode. Penggunaan istilah metode epistemologi pendidikan Islam ini dapat dibedakan dengan metode pendidikan Islam. Jika metode pendidikan Islam ini bermaksud membahas metode-metode yang dipakai untuk menyampaikan materi pendidikan Islam, maka metode epistemologi pendidikan Islam adalah dimaksudkan sebagai metode-metode yang dipakai dalam menggali, menyusun dan mengembangkan pendidikan Islam. Dengan kata lain, metode epistemology merupakan metode-metode yang dipakai dalam membangun ilmu pendidikan

Islam.⁶¹ digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, metode epistemologi pendidikan Islam lebih pada tataran pemikiran filosofis, sedangkan metode penelitian pendidikan Islam berada pada tataran teknis dan operasional. Artinya, metode epistemologi pendidikan Islam lebih merupakan alat filsafat yang membahas pengetahuan pendidikan Islam yang berusaha membangun, merumuskan dan memproses pengetahuan tentang pendidikan Islam, sedangkan metode penelitian pendidikan Islam lebih merupakan alat ilmu pendidikan Islam berusaha menemukan pengetahuan pendidikan Islam.⁶²

⁶¹Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik* op.cit., h. 270.

⁶²Ibid., h. 271.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima macam metode yang secara efektif untuk membangun pengetahuan pendidikan Islam, yaitu: metode rasional (*manhaj 'aqli*), metode intuitif (*manhaj zauqī*), metode dialogis (*manhaj jadali*), metode komparatif (*manhaj muqārin*), dan metode kritik (*manhaj naqdi*). Masing-masing metode ini memiliki cara kerja atau mekanisme kerja yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan tentang pendidikan.

a. Metode Rasional

Metode rasional adalah metode yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang bisa diterima rasio. Menurut metode ini sesuatu dianggap benar apabila bisa diterima oleh akal, seperti sepuluh lebih banyak daripada lima.

Metode ini dalam pendidikan Islam digunakan untuk mencapai pengetahuan yang bersifat apriori yang merupakan hasil dari perenungan-perenungan akal. Demikian pula, ukuran kebenaran yang dicapai adalah ukuran akal. Banyak persoalan dapat diterima kebenarannya hanya melalui penjelasan-penjelasan yang logis, tanpa bukti empiris sebagaimana terdapat pada tradisi filsafat yang objek pembahasannya adalah sesuatu yang berada

di balik fisik atau metafisik, sehingga landasan berpijaknya adalah akal yang menjadi penentu benar-tidaknya sesuatu pandangan.⁶³

Dalam kapasitas ini, al-Qur'ān banyak memberi tuntunan, bimbingan dan bantuan dalam memahami realitas sesuatu. Akan tetapi, al-Qur'ān menuntut agar dipahami dengan akal sehat. Penggunaan akal dalam memahami pesan-pesan al-Qur'ān terutama yang bersifat filosofis merupakan satu rangkaian dengan penggunaan ilmu-ilmu bantu agar maksud al-Qur'ān dapat ditangkap.

Lebih dari itu, Machfudz Ibawi berani menegaskan bahwa bahasa dalam al-Qur'an seluruhnya bersifat filosofis, dengan pengertian tidak mudah dimengerti tanpa mencari, menganalisa atau menggali sesuatu yang tersimpan di balik bahasa harfiah. al-Qur'ān yang *nota bene* sebagai petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman, sudah barang tentu banyak bagian isinya yang belum dapat dipahami manusia hingga saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran yang makin rasional dan logis sebagai media untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'ān sebagai cermin dari ajaran Islam.⁶⁴

Pada dasarnya cara berpikir rasional itu tidak mutlak kehendak akal, tetapi ada juga anjuran dari wahyu. Namun, walaupun dalil-dalil wahyu dijadikan argumen untuk menemukan kebenaran ilmiah yang diawali oleh

⁶³Ibid., h. 271-272.

⁶⁴Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, op.cit., h. 273.



dasar keyakinan, tidak berarti penalaran manusia menjadi pasif. Justru cara berpikir dengan menggunakan nalar adalah merupakan bagian dari anjuran al-Qur'ān itu sendiri. Di dalam al-Qur'ān banyak diperoleh ayat yang mendorong umat Islam untuk melakukan *i'tibar* dan menggunakan akal pikiran untuk memahami gejala alam dalam semesta ini, baik berupa intelek sensual, seperti penglihatan dan pendengaran, maupun intelek rasional, seperti berpikir dan beralasan.⁶⁵

Ada hal yang perlu menjadi catatan dari serangkaian cara itu. *Pertama*, bahwa suatu masalah bisa diproses melalui semua cara tersebut; *Kedua*, masing-masing cara itu dapat memproses masalah dan memperoleh pengetahuan yang berbeda-beda; *Ketiga*, satu cara dapat digunakan memproses hampir seluruh masalah tersebut. Dengan begitu, sebenarnya melalui metode rasional saja dapat diperoleh khazanah pengetahuan pendidikan Islam dalam jumlah yang amat besar.

b. Metode Intuitif

Salah satu metode epistemologi pendidikan Islam adalah metode intuitif. Metode ini cukup mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan pendidikan Islam. Metode intuitif ini merupakan metode yang khas bagi ilmuwan Muslim dan seakan-akan ada kesepakatan untuk menyetujui intuisi sebagai metode yang

⁶⁵Ibid., h. 275.

sah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan tradisi ilmiah Barat yang tidak pernah mengadopsi intuisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan⁶⁶

Istilah intuisi sering disebut dengan istilah-istilah lain yang substansinya relatif sama. Sebutan-sebutan istilah oleh para ahli tentang intuisi itu memberikan pengayaan terhadap perbendaharaan nama atau identitas. Selain itu, sekaligus mencerminkan sudut pandang mereka ketika memperhatikan atau mengamati fakta intuisi yang pernah dialaminya sendiri. Sebab masing-masing istilah yang diberikan itu akan membawa konsekuensi setidaknya pada tekanan maksud atau makna. Muḥammad Iqbal menyebut intuisi ini dengan istilah “cinta” atau “pengalaman kalbu” dengan alasan bahwa “cinta” identik dengan “pengalaman kalbu”, meskipun pengalaman kalbu meliputi unsur-unsur lain yang banyak jumlahnya selain cinta.

Adapun Imām al-Ghazālī menyebut intuisi itu dengan sebutan *al-zauq*, atau *ilm ladunni* (pengetahuan tentang penyingkapan misteri-misteri Ilahi).⁶⁷ Hal ini ia dasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Kahfi: 65

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hambahamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.”⁶⁸

⁶⁶Ibid., h. 296.

⁶⁷Ibid., h. 296-297.

⁶⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 425.

Sedangkan dalam pembahasan filsafat, metode intuitif ini biasa disebut metode *a priori*, yakni adanya pengetahuan yang diperoleh sebelum didahului oleh pengalaman, sehingga pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan intuitif merupakan pengetahuan yang tiba-tiba secara teranugerahkan dan tanpa melalui pengalaman sama sekali.⁶⁹

Selain itu, karena intuisi memang berada dalam diri manusia dan merupakan potensi manusia untuk memperoleh pengetahuan yang sering disebut dengan pengetahuan yang teranugerahkan.

Berdasarkan alur pemikiran ini, pendidikan Islam tidak bisa melepaskan diri dari pengetahuan intuitif. Justru, pendidikan Islam harus selalu menampung berbagai macam pengetahuan dari bermacam-macam metode, termasuk pengetahuan yang dihasilkan dari metode intuitif, sebab hal ini akan memberi manfaat pengayaan khazanah pengetahuan dalam pendidikan Islam itu sendiri.⁷⁰

Dalam ilmu pengetahuan Islam – termasuk di dalamnya psikologi Islam – bukan hanya menggunakan indera dan akal dalam merumuskan suatu konsep, tapi yang tak kalah strategisnya adalah menggunakan intuisi dan wahyu. Intuisi memberikan sumbangan yang signifikan terhadap bangunan ilmu pengetahuan Islam, karena intuisi dijadikan sebagai metode

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, op.cit., h. 299.

dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Dengan begitu, tradisi ilmu pengetahuan Islam telah mengangkat intuisi dari sekedar fakta psikologis menjadi salah satu metode epistemologi. Sebagai suatu metode epistemologi, intuisi menjadi bersifat aktif dan produktif dalam memproses pengetahuan.

Mengenai pertanyaan orang tentang kemungkinan intuisi sebagai metode dan ilmu pengetahuan, maka dapat dijawab dengan tiga alasan:

Pertama, metode intuisi adalah metode yang banyak digunakan secara efektif di kalangan orang-orang yang bergelut dalam spritual. *Kedua*, metode intuisi dapat diuji kemampuannya dalam memahami realitas secara objektif. *Ketiga*, metode intuisi dapat dipelajari dan dikuasai oleh siapa pun dengan usaha-usaha yang intens dan terbimbing.⁷¹

Intuisi, dalam pengertian kemampuan mencapai kesimpulan secara tepat, tanpa melalui langkah-langkah logika (*al-hads*), maupun dalam pengertian pengalaman mencerahkan (*al-wijdan*), adalah sampainya diri pada makna, atau sampainya makna pada diri, baik itu diperoleh melalui pembuktian, seperti dalam hal yang pertama (*al-hads*), atau datang dengan sendirinya dalam hal yang kedua (*al-wijdan*). Hakikat intuisi ini menurut al-Taḥāwunī, bisa bertambah dan berkurang. Bila kita mengamati pengalaman kita sehari-hari tampaknya ada perbedaan frekuensi intuisi yang muncul dalam rentang waktu tertentu. Adakalanya dalam waktu yang berurutan

⁷¹Ibid., h. 307.

muncul beberapa kali, tetapi terkadang dalam waktu yang lama juga tidak kunjung tiba.⁷²

c. Metode Dialogis (*Manhaj Jadali*)

Metode dialogis yang dimaksudkan di sini adalah upaya menggali pengetahuan yang dilakukan melalui dialektika (tanya-jawab) antara dua orang ahli atau lebih berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷³

Upaya untuk mencari jawaban-jawaban adalah aktivitas yang sah menurut Islam maupun ilmu pengetahuan. Peristiwa tanya-jawab sebagai wujud dari dialogis telah dikemukakan al-Qur'an. Menurut Muhammad Anwar terdapat 15 ayat yang mengindikasikan perolehan pengetahuan melalui metode dialogis.⁷⁴ Ayat-ayat ini dalam al-Qur'an dimulai dengan kata-kata *yas'alunaka* (mereka bertanyayang kemudian disambung dengan objek pertanyaan dan diikuti kata *qul* (katakanlah) baru memberi jawaban, kecuali pada surat al-Nazi'at [79]: 42.⁷⁵

⁷²Ibid., h. 313

⁷³Ibid., h. 328.

⁷⁴Di antara ayat-ayat ini adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 189, 215, 217, 219, dan 220, Q.S. al-Mā'idah [5]: 4, Q.S. al-A'raf [7]: 187.

⁷⁵Ternyata pada ayat ini setelah dicermati mengandung rahasia tertentu, bahwa orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari berbangkit bukan semata-mata ingin mendapatkan jawaban yang pasti, melainkan sebagai ejekan.

Ayat-ayat al-Qur'ān yang memakai kata *yas'alunaka* dan *qul* merupakan bukti terjadinya dialog, karena ada pertanyaan dan ada jawaban meskipun tidak secara langsung, sebagaimana Q.S. al-Baqarah [2]: 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji...”⁷⁶

Dari jawaban yang diterima sebagai respon atas pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya penanya dapat memperoleh pengetahuan baru.

Bahkan kita semua bisa memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ditanyakan tersebut. Andaikata tidak ada dialog tentang masalah itu, niscaya kita berusaha menjawab secara spekulatif yang tidak ada jaminan kebenarannya sama sekali.⁷⁷

d. Metode Komparatif (*Manhaj Muqārin*)

Metode komparatif adalah metode memperoleh pengetahuan – dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam – dengan cara membandingkan teori maupun praktik pendidikan, baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Metode ini ditempuh untuk mencari keunggulan-keunggulan maupun memadukan pengertian atau

⁷⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 42.

⁷⁷Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, op.cit., h. 328-329.

pemahaman, supaya didapatkan ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Maka metode komparatif ini masih bisa dibedakan dengan pendidikan perbandingan.⁷⁸

Metode komparatif sebagai salah satu metode epistemologi pendidikan Islam memiliki objek yang beragam untuk diperbandingkan, yang meliputi; perbandingan sesama ayat al-Qur'an tentang pendidikan, antara ayat-ayat pendidikan dengan hadis-hadis pendidikan, antara sesama hadis pendidikan, antara teori dari pakar pendidikan Islam dan non Islam, antara sesama lembaga pendidikan Islam, antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan non Islam, antara sesama sejarah umat Islam dahulu dan sekarang. Masing-masing perbandingan ini memiliki karakteristik yang tentunya berbeda.⁷⁹ Salah satu contoh dari perbandingan antar ayat al-Qur'an yang sama-sama membahas tentang pendidikan adalah seperti perbandingan Q.S. al-Mujādilah [58]: 11 dan Q.S. al-Taubah [9]: 122 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
 "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya

⁷⁸Ibid., h. 342.

⁷⁹Ibid., h. 343.

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸⁰

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”⁸¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari segi mekanisme kerjanya, metode komparatif ini diaplikasikan melalui langkah-langkah kerja secara bertahap sebagai berikut: *Pertama*, menelusuri permasalahan-permasalahan yang setara tingkat dan jenisnya; *Kedua*, mempertemukan dua atau lebih permasalahan yang setara tersebut; *Ketiga*, mengungkapkan ciri-ciri dari objek yang sedang dibanding-kan secara jelas dan terinci; *Keempat*, mengungkapkan hasil perbandingan; dan *Kelima*, menyusun atau memformulasikan teori-

⁸⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 910.

⁸¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 301.

teori yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (logis dan objektif, khususnya).⁸²

e. Metode Kritik (*Manhaj Naqdi*)

Metode kritik di sini dimaksudkan sebagai usaha menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya. Dengan kata lain, kritik digunakan dalam menguji validitas pengetahuan, sehingga dasar atau motif timbulnya kritik bukan karena adanya kebencian, melainkan karena adanya kejanggalan atau kelemahan yang harus diuruskan.

Di dalam sejarah filsafat kita melihat para filosof saling mengkritik dan menggugurkan, tetapi juga menawarkan alternatif pemikiran yang rasional, meskipun pemikiran rasional yang ditawarkan itu akhirnya digugurkan oleh pemikiran rasional yang lain.

Kita bisa mencatat, bagaimana Democritos berupaya membantah Parmenides tentang tidak adanya pluralitas, Socrates menentang pemikiran Protagoras tentang relativisme kebenaran, Aristoteles menyerang Plato tentang idea-idea, Immanuel Khan menentang skeptisisme Hume tentang kebenaran pengetahuan, para idealis (Fichte, Schelling, dan Hegel)

⁸²Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*, op.cit., h. 348-349.

menyangkal konsep Khan tentang '*das Ding ansich*', John Stuart Mill membantah August Comte tentang mustahilnya psikologi yang ilmiah, dan Soren Kierkgaard menyerang Hegel tentang idea yang bersifat umum.

Di kalangan filosof Muslim kita menyaksikan, bagaimana al-Ghazālī menyerang pikiran Ibnu Sinā dan kawan-kawannya sampai mengkafirkan mereka yang dimuat dalam kitab *Tahafut al-Falasifah*, kemudian Ibnu Rushd menentang pandangan al-Ghazālī itu atas nama para filosof yang dituangkan dalam kitab *Tahafut al-Tahafut*. Demikian juga dengan al-Farabī yang menentang Ibnu al-Rawandī dan al-Razī tentang penolakan terhadap Nabi. Sedangkan al-Amirī juga menentang al-Razī dalam masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
sama.⁸³

Adapun kritik dalam arti sebagai metode untuk mendapatkan pengetahuan berusaha menghindari keadaan yang tidak kondusif itu. Justru, kritik itu terlahir dari proses berpikir secara cermat, jernih terhadap konsep, teori-teori, pemikiran-pemikiran maupun praktek-pratek yang dikritik. Kemudian kritikus mencoba membangun konsep, teori, atau pemikiran yang dapat dijadikan alternatif pemecahan terhadap kelemahan tersebut. Baru sampai di sini kritik tersebut mampu menghasilkan dua macam pengetahuan; pengetahuan tentang kelemahan dari objek kritik dan pengetahuan tentang alternatif pemecahan terhadap kelemahan itu.⁸⁴

⁸³Ibid., h. 350-351.

⁸⁴Ibid., h. 353.

Adapun pelaksanaan metode kritik ini melalui tahapan-tahapan: (1) usaha mencermati objek kritik (bisa teori maupun praktek pendidikan), (2) usaha merelevansikan objek kritik dengan pedoman atau pijakan, (3) usaha menentukan kesalahan-kesalahan, (4) usaha mencari alternatif pemecahan, (5) usaha menawarkan teori baru sebagai alternatif pemecahan dan menguji teori alternatif pemecahan itu. Tahapan-tahapan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Tahapan yang satu memiliki kaitan erat dengan tahapan lainnya, sehingga jika salah satu tahapan dipisahkan akan menjadikan kritik kurang atau tidak berbobot lagi.⁸⁵

Sebenarnya, di dalam Islam telah berkembang pemahaman bahwa metode epistemologi itu muncul bermula sejak manusia diciptakan pertama kali. Ini dimulai dari penamaan Adam dan pengklasifikasian semua benda yang kemudian diikuti oleh penemuan hasil percobaan-percobaan dan investigasi metodologis sistematis terkini.

Sedangkan umat Muslim dalam mengembangkan metodologi empiris ilmiah terinspirasi oleh al-Qur'ān, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya reformasi Eropa, Renaissance, serta revolusi ilmiah dan teknologi yang dimulai pada awal abad 16. Dengan mendayagunakan wahyu, potensi akal dan pengalaman orang Muslim mengoreksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan Yunani sebelum menyebarkannya ke Eropa. Mereka mengganti

⁸⁵Ibid., h. 358.

logika deduktif Aristoteles dan definisinya dengan sebuah logika induktif Islam yang diinspirasi oleh al Qur'ān.

al Qur'ān menyediakan prinsip-prinsip umum yang menggabungkan pengamatan empiris; membebaskan pikiran dari keragu-raguan, taklid buta, ketergantungan intelektual, dan hawa nafsu. Paradigma tauhidnya menjadi dasar dari hubungan kausalitas, rasionalitas, perintah, prediksi, penemuan, obyektivitas, dan hukum alam. Hukum bisa diketahui melalui wahyu, pengamatan empiris dan eksperimen.

Sehingga tidak mengherankan jika para ahli al Qur'ān mengajarkan metodologi induktif, pengamatan empiris (*naḍar* dan *tabassur*), interpretasi (*tadabbur*, *tafakkur*, *i'tibaar* dan *tafaqquḥ*) dan pengetahuan yang terbukti (*bayyināt* dan *burhān*). al Qur'ān melarang asal ikut-ikutan (*taqlīd*), prasangka (*ẓann*), dan keinginan pribadi (*hawa nafsu*). Konsep al Qur'ān dari *istiqāmah* menghasilkan kepercayaan dan pengetahuan yang tidak bias. Konsep al Qur'ān dari *istikhlaf*, *taskhir*, dan *isti'mar* menjadi dasar dari teknologi. Konsep dari *'ilm nāfi* menggarisbawahi perintah untuk mengubah pengetahuan dasar menjadi teknologi yang bermanfaat.

Ilmu pengetahuan klasik beserta konsepnya dapat diaplikasikan ke dalam IPTEK. Tafsir ilmu dan tafsir tematik (*mawḍu'i*) menekankan interpretasi data paralel pada penelitian empiris. *'Ilm al-nasakh* menjelaskan bagaimana data-data baru memperbaharui teori-teori yang lama tanpa

membuatnya tidak berguna sama sekali. *'Ilm al rijāl* dapat menguatkan keyakinan para peneliti. *'Ilm naqd al-ḥadīth* menanamkan perilaku 'membaca kritis' literatur sains. *Qiyās* adalah analogi alasan-alasan. *Istihbāb* merupakan aplikasi berkelanjutan dari sebuah hipotesis atau hukum ilmu pengetahuan sampai menemukan bukti. *Istiḥsān* dapat dibandingkan dengan intuisi ilmiah. *Istislah* adalah penggunaan kepentingan umum untuk membuat keputusan atas banyak pilihan, contohnya teknologi pengobatan. *Ijmā'* adalah kesepakatan yang ditetapkan oleh para ilmuwan empiris. *Maqāsid al-shari'ah* adalah alat konsep untuk menyeimbangkan penggunaan S&T. *Qawāid al-shari'ah* adalah aksioma yang menyederhanakan operasi logika kompleks dengan membangun aksioma tanpa melewati derivasi detail.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Landasan dan Tujuan Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya agar ia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Dalam “Ketentuan Umum” UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan secara tegas tentang makna dari pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Hal tersebut agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan masing-masing sehingga dapat memilah antara satu dengan yang lain dan tidak menimbulkan kerancuan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.¹

Selain itu, dalam undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

¹Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003), h. 2.

²Ibid., h. 3.

B. Visi, Misi, dan Strategi Pendidikan di Indonesia

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.

Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui

visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi sebagai berikut:

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.³

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

³Ibid., h. 24.

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain itu, pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu.

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang sisdiknas 2003 meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

⁴ Ibid., h. 25.

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.⁵

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

C. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur sedemikian rupa dan didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan

⁵Ibid.

tuntutan zaman. Hal itu agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ada.

Di dalam Undang-undang No. 20 Bab III Pasal 4 dijabarkan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berikut ini:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁶

Prinsip-prinsip di atas menurut penulis sangat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum, sehingga prinsip

⁶Ibid., h. 3- 4.

tersebut dapat dikatakan telah mencerminkan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, pemerintah dan masyarakat hendaknya bersama-sama menyelenggarakan pendidikan yang sejalan dengan prinsip tersebut.

D. Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran (*courses*) yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan ijazah.⁷ Dalam ruang lingkup yang lebih luas definisi kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik.⁸

Di dalam Undang-undang No. 20 Bab X Pasal 36 dijabarkan tentang kurikulum, terutama pengembangan kurikulum yang perlu terus diinovasi. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka

⁷Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 3-4.

⁸Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 152.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- (1) Peningkatan iman dan takwa;**
- (2) Peningkatan akhlak mulia;**
- (3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;**
- (4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;**
- (5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;**
- (6) Tuntutan dunia kerja;**
- (7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;**
- (8) Agama;**
- (9) Dinamika perkembangan global; dan**
- (10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.⁹**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan berbeda antara satu dengan lainnya. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- (1) Pendidikan agama;**
- (2) Pendidikan kewarganegaraan;**
- (3) Bahasa;**
- (4) Matematika;**
- (5) Ilmu pengetahuan alam;**
- (6) Ilmu pengetahuan sosial;**
- (7) Seni dan budaya;**
- (8) Pendidikan jasmani dan olahraga;**

⁹ Ibid., h. 12.

- (9) Keterampilan/kejuruan; dan
- (10) Muatan lokal.¹⁰

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah di atas wajib memuat sepuluh mata pelajaran yang harus diajarkan pada para siswa. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- (1) Pendidikan agama;
- (2) Pendidikan kewarganegaraan; dan
- (3) Bahasa.¹¹

Ketiga mata pelajaran tersebut harus ada dan diajarkan di pendidikan tingkat tingkat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 Bab X Pasal 38 butir 1-4 dijabarkan, bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.¹²

¹²**ibid., h. 13.**

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI PARADIGMA EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Analisis Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam

Sebagaimana diterangkan pada Bab II, bahwa berdasarkan berbagai definisi tentang paradigma epistologi dan pendidikan Islam, akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan "Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam" adalah kerangka konseptual tentang bagaimana cara, proses, dan prosedur untuk memperoleh, mengetahui serta mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul, hakikat, sasaran dan metode pendidikan Islam dengan tujuan mendapatkan keyakinan.

Selain itu, terdapat lima macam metode yang secara efektif digunakan untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam, yaitu: metode rasional (*manhaj aqlī*), metode intuitif (*manhaj dhauqī*), metode dialogis (*manhaj jadālī*), metode komparatif (*manhaj muqārin*), dan metode kritik (*manhaj naqdī*). Masing-masing metode ini memiliki cara kerja atau mekanisme kerja yang berbeda-beda dalam memperoleh pengetahuan tentang pendidikan. Perbedaan mekanisme kerja ini sebagai khazanah teknis yang harus dipertahankan.

Selanjutnya berdasarkan beberapa pendapat tentang pendidikan (Islam), akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu proses pembentukan dan menumbuh-kembangkan kemampuan dasar yang dimiliki manusia menuju kesempurnaan hidup. Dalam Islam kesempurnaan hidup dapat diraih dengan menjalankan kehidupan ini secara seimbang. Karena itu, hakekat pendidikan adalah usaha mengarahkan dan membimbing potensi dasar (*fiṭrah*) anak didik menuju kesempurnaan. Berkaitan dengan pendidikan Islam, maka pandangan hidup yang mendasari seluruh proses pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang Islami, yang merupakan nilai-nilai luhur bersifat transendental, eternal, dan universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menilik paparan di atas, maka akan ditemukan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam pendidikan Islam itu sebenarnya bukanlah istilah yang digunakan, tetapi implementasi dari istilah itu sendiri, yaitu proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan serta pertumbuhan potensi dasar (*fiṭrah*) anak didik, agar ia dapat menyadari (*conscious*) akan jati dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk selanjutnya menuju kesempurnaan hidup (*insān kāmil*) dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Islam sebagai agama wahyu sangat mementingkan hidup masa depan yang berorientasi duniawi-ukhrowi telah menempatkan dasar-dasar teoritis tentang pentingnya orientasi dan visi masa depan tersebut dalam al-Qur'ān, antara lain tercantum dalam surat al-Ḥashr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Dari ayat al-Qur’ān tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memiliki pandangan yang visioner serta memiliki sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Ilmu-ilmu pengetahuan yang diharapkan oleh Allah SWT agar menjadi penopang kemantapan keimanan dapat disederhanakan ke dalam tiga sumber orientasi, yaitu:

1. Pengembangan kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui sebagai sumber pokok ilmu pengetahuan
2. Pengembangan ke arah kehidupan sosial manusia yang semakin kompleks dan menekankan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pengembangan ke arah alam sekitar yang diciptakan-Nya sebagai penopang kehidupan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa orientasi pendidikan Islam memiliki keterkaitan dengan pemahaman akan fungsi keberadaan manusia di muka bumi, yakni sebagai khalifah. Agar fungsi kekhalifahan itu bisa berjalan dengan sempurna, maka peran ilmu pengetahuan sangat diperlukan guna menjaga

¹Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 919.

hubungan manusia dengan Khaliq-nya, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya. Orientasi kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya perlu mengembangkan ketiga aspek tersebut yang mempunyai proyeksi ke depan, bersifat inovatif (*innovative learning*), bukan semata-mata melestarikan apa yang ada (*maintenance learning*), tidak pasif serta dogmatis. Hal ini relevan dengan harapan ‘Alī bin Abī Tālib ra:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ غَيْرَ مَا عَلَّمْتُمْ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِرِمَازٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

“Didiklah anak-anak kalian tidak seperti apa yang diajarkan kepada kalian sendiri. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan untuk suatu zaman yang tidak sama dengan zaman kalian sekarang.”²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahamannya adalah, bahwa konsep pendidikan Islam mempunyai

jangkauan ke masa depan bagi anak didik, yakni berupaya menciptakan sosok pribadi yang dikehendaki. Pengembangan sosok pribadi yang dikehendaki tersebut bisa dicapai melalui kurikulum pendidikan Islam, yakni menyangkut bahan atau jenis-jenis mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik yang terhimpun dalam kurikulum pendidikan Islam.³

Sumber bahan dan materi pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui bahan yang terdapat dalam nash dan realitas kehidupan. Kutipan beberapa nash al-Qur’ān dan Ḥadīth ini diharapkan dapat menggambarkan sumber bahan (materi)

²Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 18.

³Mulkan, A.M., *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: Sypress, 1993), h. 247.

epistemologi pendidikan Islam atau yang menjadi isi (*content*) dari suatu kegiatan pendidikan Islam:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ⁴

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka *al-Kitāb* (al-Qur’ān) dan *al-Hikmah* (al-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”⁷

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ⁸

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan

⁴al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah), 129.

⁵Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 33.

⁶al-Qur’ān, 31 (al-Luqman), 13.

⁷Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 654.

⁸al-Qur’ān, 31 (al-Luqman), 17.

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan.”⁹

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ¹⁰

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!”¹¹

Di samping ayat-ayat di atas, di bawah ini akan disajikan pula beberapa ḥadīth Nabi yang berkaitan dengan pendidikan.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْظَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ¹²

(Ibn Mājah berkata) telah menceritakan kepada kami Hishām ibn ‘Ammār, telah menceritakan kepada kami Ḥafṣ ibn Sulaimān, telah menceritakan kepada kami Kathīr ibn Shinzīr, dari Muḥammad ibn Sīrīn, dari Anas ibn Mālik, katanya, Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya atas setiap muslim laki-laki (dan muslim perempuan).”

⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 655

¹⁰al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah), 31.

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 14.

¹²Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwanī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol.1 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), 81.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ
خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ¹³

(al-Bukhārī berkata) telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn 'Ufair, katanya telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, dari Yūnus, dari Ibn Shihāb, katanya Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān berkata: Aku mendengar Mu'āwiyah berkhotbah seraya menyatakan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang ingin dianugerahi suatu kebaikan oleh Allah, maka ia dipahamkan dalam hal agama dan bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan belajar."

Selain hadis-hadis tersebut di atas, masih banyak keterangan lain yang bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dengan demikian, semua jenis ilmu yang dikembangkan oleh ahli pikir Islam dari kandungan al-Qur'an adalah ilmu Islam. Hanya saja dalam hal pengklasifikasian materi ilmu dan kurikulum yang diambil dari al-Qur'an tersebut, mereka memiliki perbedaan-perbedaan dalam bentuk dan istilah yang digunakan.

Selanjutnya mengenai makna pendidikan Islam itu sendiri – terlepas dari perbedaan tentang istilah pendidikan Islam – para pakar pendidikan Islam telah menyepakati bahwa hakikat dari pendidikan Islam adalah proses pembentukan dan menumbuh-kembangkan kemampuan dasar yang dimiliki manusia menuju

¹³Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol.1 (t.tp: Dār Ṭuruq al-Najāh, t.th), 25.

kesempurnaan hidup. Dalam Islam kesempurnaan hidup dapat diraih dengan menjalankan kehidupan ini secara seimbang. Karena itu, hakekat pendidikan adalah usaha mengarahkan dan membimbing fitrah anak didik menuju kesempurnaan.

Jika kita telusuri secara konprehensif, maka akan ditemukan bahwa Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang integral dan berkeimbangan serta mencakup semua aspek kepribadian manusia. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh pendidikan Islam adalah: jasad, akal, akidah, emosi, estetika dan sosial. Karena itu, pendidikan Islam harus diarahkan untuk pengembangan aspek-aspek tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam ingin membentuk manusia yang menyadari dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahannya serta memperkaya diri dengan khazanah ilmu pengetahuan tanpa mengenal batas. Namun juga menyadari bahwa hakikat keseluruhan hidup dan pemilikan ilmu pengetahuan yang dimaksud tetap bersumber dan bermuara kepada Allah.

Sedangkan asal-usul dan sumber nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam, sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta hasil ijtihad. Di dalam sumber tersebut banyak nilai yang fundamental yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut adalah tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat dan *rahmatan lil 'ālamīn*.

Berdasarkan hal tersebut, berarti pendidikan Islam berakar dari sumber asli dan fundamental. Sebagaimana diketahui, bahwa al-Qur'ān dan al-Ḥadīth merupakan rujukan utama dalam agama Islam. Melalui kedua sumber itulah umat Islam dapat mengetahui seraya mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Dengan demikian, berarti pula bahwa pendidikan Islam memiliki pijakan dan sumber yang jelas, sehingga benar-benar dapat menjadi sarana dalam proses internalisasi nilai-nilai islami. Sedangkan ijtihad dijadikan sebagai sumber sekunder dari pendidikan Islam, menunjukkan bahwa kreasi dan inovasi para ulama dapat dijadikan sumber pendidikan Islam selama tidak bertentangan dengan kedua sumber utama di atas, yaitu al-Qur'ān dan al-Ḥadīth.

B. Analisis Sistem Pendidikan di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis sistem pendidikan di Indonesia yang tertuang jelas di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. Di sini, penulis akan menganalisis paradigma baru yang ada di dalam undang-undang tersebut yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang- undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain:

1. Demokratisasi dan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (OTDA). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga perana pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

2. Peran Serta Masyarakat

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).

Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan

kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).

3. Tantangan Globalisasi

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan di muka, harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2).

Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).

Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian, badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/ atau satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu, diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan.

Dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasikan dalam sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler (pasal 31 ayat 1 dan 2).

4. Kesetaraan dan Keseimbangan

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan "plat merah" atau "plat kuning";

semuanya berhak memperoleh dana dari negara dalam suatu sistem yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik (pasal 4 ayat 2).

Selain itu, UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3).

Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu, selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3), dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.

C. Analisis Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia.

Dalam menganalisis relevansi paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia, terlebih dahulu harus *me-review* persamaan dan perbedaan yang terdapat pada keduanya. Melalui *review* tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan, apakah paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia tersebut memang memiliki relevansi.

1. Segi Persamaan Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia.

Secara komparatif, ada beberapa persamaan antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia. Tetapi yang akan disajikan di sini hanyalah persamaan dalam konsep dasarnya saja. Dari persamaan konsep dasar tersebut tentunya akan berimplikasi pada dimensi yang lain. Berikut persamaan antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia:

Pertama, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia sama-sama memaknai pendidikan sebagai media untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kearah titik yang maksimal. Hal ini berarti keduanya menyadari akan fitrah yang mesti dimiliki oleh setiap anak didik, sehingga tugas pendidikan itu seyogyanya mampu

mengantarkan anak pada kematangan dan kesempurnaannya.

Kedua, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia sama-sama menyinggung agar pendidikan dapat menyeimbangkan antara kemampuan iman, ilmu dan amal. Pendidikan Islam dirancang agar kehidupan duniawi dan ukhrowi menjadi milik umat-Nya dengan modal iman, amal dan takwa kepada-Nya. Hal ini sangatlah relevan dengan tujuan jangka panjang yang dicanangkan dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia sama-sama menjadikan keimanan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena bangsa Indonesia menganut kepercayaan kepada Tuhan YME, bahkan menjadikannya sebagai sila pertama dalam Pancasila yang menjiwai terhadap sila-sila berikutnya. Dengan demikian, ada titik temu antara pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang dilandaskan pada aspek keimanan pada Tuhan.

Keempat, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia sama-sama menjadikan pendidikan sebagai sarana pembudayaan nilai atau internalisasi nilai. Pendidikan Islam menyadari, bahwa untuk melanggengkan ajaran Islam haruslah ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, di antaranya melalui *mainstream* pendidikan.

Kelima, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem

pendidikan di Indonesia sama-sama mengakui perbedaan potensi masing-masing yang bisa dikembangkan.

Keenam, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia sama-sama menilai bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Dalam konsepsi Islam, pendidikan berlangsung sepanjang hayat (*longlife education*). Oleh karena itu, tujuan akhir pendidikan harus terefleksi sepanjang kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam pada dasarnya sejajar dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam sistem pendidikan juga disebutkan demikian. Artinya, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi di mana saja dan sampai kapan pun saja.

Ketujuh, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional sama-sama ingin membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Arifin menyatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek

kehidupan dalam rangka mencari ridlo-Nya.¹⁴ Rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut sangatlah relevan dengan tujuan pendidikan nasional (lihat: UU Sisdiknas No. 2 Tahun 2003).

Kemudian yang menjadi pokok dari materi pendidikan Islam ialah bahan- bahan, aktifitas dan pengalaman mengandung unsur ketauhidan. Kalimat tauhid melalui suara adzan yang diperdengarkan ke telinga bayi yang baru lahir merupakan materi kurikulum pendidikan Islam yang pertama diberikan kepada anak (bayi) dalam pendidikan Islam, melalui muatan adzan. Fungsi adzan yang berintikan ketauhidan itu, dalam pandangan pendidikan Islam, sangat penting untuk ditanamkan ke dalam pribadi anak muslim sedini mungkin, dengan harapan mereka senantiasa terbimbing ke suasana dan kondisi yang sejalan dengan hakikat penciptaannya, sebagai pengabdian Allah SWT.¹⁵

Tujuan yang akan dicapai dari pendidikan Islam ialah membentuk anak didik menjadi berakhlak mulia, dalam hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia. Sehubungan dengan kurikulum pendidikan Islam ini, dalam penafsiran luas, kurikulumnya berisi materi untuk pendidikan seumur hidup (*long life education*).

Persamaan-persamaan tersebut, sekali lagi, hanya dalam tataran konsep dasarnya saja, artinya dalam tataran impelentasinya bisa saja berbeda. Oleh

¹⁴Arifin, *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat: Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial dan Kultural* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), h. 237.

¹⁵Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 45.

karena itu, hal tersebut membutuhkan analisa lebih lanjut.

2. Segi Perbedaan Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia.

Selain memiliki persamaan, terutama pada konsep dasarnya, paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia juga memiliki sisi perbedaan yang tidak boleh tidak harus diakui. Namun perbedaan tersebut tidaklah mendasar, sehingga masih bisa ditarik sisi persamaannya.

Berikut ini akan disajikan beberapa perbedaan antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Pertama, Paradigma epistemologi pendidikan Islam secara tegas menetapkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber pokok, kemudian qiyas, kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash, ijma' ulama dan ahli pikir Islami yang sesuai dengan sumber dasar Islam. Sedangkan pendidikan di Indonesia menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar pelaksanaan pendidikan-nya, sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas tahun 2003.

Tetapi, meskipun landasan konseptualnya kelihatannya berbeda, namun jika dikaji secara seksama tentang bagaimana sebenarnya Pancasila dan UUD '45, maka akan ditemukan suatu kenyataan bahwa secara

substansial keduanya sama sekali tidak bertentangan dengan sumber-sumber pendidikan Islam; bahkan jika ditelusuri lebih dalam, maka akan tersingkap bahwa isi dan esensi (ruh) Pancasila dan UUD '45 secara keseluruhan sebenarnya mengadopsi dari sumber-sumber pendidikan Islam (al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijtihad ulama). Dengan demikian, pada hakikatnya tidak ada perbedaan sumber pendidikan di antara keduanya.

Kedua, paradigma epistemologi pendidikan Islam mencita-citakan agar pendidikan yang bersumber dari kelima dalil tersebut dapat diejawantahkan dengan pelaksanaan pendidikan yang mengandung nilai tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat dan *rahmatan lil 'alamin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak perbedaan di sini, bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang universal ketimbang, yaitu tidak ada misi *rahmatan lil 'alamin* sebagaimana dalam paradigma epistemologi pendidikan Islam.

Ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah ingin membentuk pribadi muslim yang sempurna (*al-insan al-kamil*) yang mana di satu sisi ia menjadi *'abdullah* (hamba Allah yang taat) dan sisi lain menjadi *khalifatullah* (orang yang bisa memakmurkan dunia). Tujuan pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia adalah ingin membentuk pribadi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Perbedaan di sini, lagi-lagi, tidaklah substansial dan hanya perbedaan istilah belaka. Sebab jika dicermati, istilah *insan kamil* (dalam epistemologi pendidikan Islam) sebenarnya diejawantahkan dalam sosok “manusia Indonesia yang seutuhnya” yang berkepribadian, cerdas, mampu mengendalikan diri (dalam sistem pendidikan di Indonesia). Sedangkan istilah *‘abdullah* sebenarnya juga telah terwakili dengan istilah “pribadi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan berakhlak mulia”. Selanjutnya istilah *khalifatullah* (orang yang bisa memakmurkan dunia) diimplementasikan dengan bentuk manusia Indonesia yang memiliki “keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam konteks ini, paradigma epistemologi pendidikan Islam dan sistem pendidikan di Indonesia tidak terdapat perbedaan yang hakiki.

Jika ditarik suatu konklusi melalui logika-induktif, maka berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia memiliki relevansi, artinya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dan substansial. Meskipun seakan-akan terdapat perbedaan, namun sebenarnya jika ditelusuri secara mendalam, perbedaan tersebut tidaklah mendasar, sehingga masih bisa ditarik sisi persamaannya. Tetapi harus diakui, bahwa misi pendidikan Islam lebih universal daripada sistem pendidikan di

Indonesia yang tidak memiliki misi *rahmatan li al-'ālamīn*.

Perbedaan-perbedaan di atas kiranya dapat mengimbangi persamaan yang ada antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan tersebut, maka akan dapat membantu pada tahap analisa selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tentang "Relevansi Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan di Indonesia", maka penulis dapat mengemukakan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada bab terdahulu, yaitu:

1. Paradigma merupakan suatu kerangka konseptual atau model yang dengannya seorang ilmuwan bekerja. Secara filosofis, epistemologi adalah mempertanyakan tentang bagaimana cara mengetahui sesuatu; atau mempelajari asal-usul, hakikat dan metode sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan keyakinan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan "Paradigma Epistemologi Pendidikan Islam" adalah kerangka konseptual tentang bagaimana cara mengetahui serta mempelajari asal-usul, hakikat, sasaran dan metode pendidikan Islam dengan tujuan mendapatkan keyakinan.

2. Sistem pendidikan di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pendidikan nasional itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Berdasarkan analisis persamaan dan perbedaan antara paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia, maka melalui logika-induktif, penulis dapat menyimpulkan bahwa keduanya (paradigma epistemologi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan di Indonesia) memiliki relevansi, artinya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dan substansial. Meskipun seakan-akan terdapat perbedaan, namun sebenarnya jika ditelusuri secara mendalam, perbedaan tersebut tidaklah mendasar, sehingga masih bisa ditarik sisi persamaannya. Tetapi harus diakui, bahwa misi pendidikan Islam lebih universal daripada sistem pendidikan di Indonesia yang tidak memiliki misi *rahmatan lil 'alamin*.

B. Saran-saran

Pada bagian akhir ini penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai *follow up* dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Saran-saran tersebut khususnya ditujukan kepada:

1. Praktisi pendidikan Islam; hendaknya epistemologi pendidikan Islam dapat diimplementasikan dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga ia tidak merasa asing di tengah pluralitas umatnya. Selain itu juga hendaknya dalam memformulasikan paradigma epistemologi pendidikan Islam, semakin menyeimbangkan antara eksplorasi ayat-ayat *qawliyyah* dan *kawuniyyah* sekaligus, mengingat al-Qur'an dan Hadits sarat dengan petunjuk (*hudân*), penjas (bayân), dan pembeda (*furqân*) tentang alam semesta ini.

2. Pemerintah (khususnya legislatif); hendaknya: (a) Mengubah paradigma, utamakan pendidikan akhlak. Ini berarti utamakan pendidikan agama. Artinya, pendidikan agama harus dijadikan *core* (inti) sistem pendidikan. Bila suatu negara lemah penguasaan sainsnya, negara itu belum langsung hancur; bila suatu negara lemah akhlaknya, negara itu akan langsung hancur. Logikanya, pendidikan agama lebih penting dari pada pendidikan sains. Pendidikan sains diperlukan juga, kegunaannya ialah agar negara cepat kaya secara material. (b) Mendesain model kurikulum sesuai paradigma itu. Untuk mendukung misi universal pendidikan, model kurikulum kita itu cukup berisi dua macam pendidikan yaitu pendidikan akhlak (yang berupa pendidikan agama) dan pendidikan sains, tentu model ini terlalu umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M., Mulkan. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: Sipsess).
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- _____. 1993. *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara).
- _____. 1994. *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat: Suatu Pendekatan Filosofis, Pedagogis, Psikososial dan Kultural* (Jakarta: Golden Terayon Press).
- _____. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara).
- _____. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Azyumardi Azra. 1999. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol.1. t.tp: Dār Ṭuruq al-Najāh, t.th.
- Darajat, Zakiah. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Elmubarak, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak, Menyambungkan yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*, (Bandung: Alfabeta).
- al-Ghazālī. *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*. Juz 1 (Surabaya: Dār al-Nashr al-Mishriyah, tt).
- <http://e-bookmarket.com/doc/maksud-paradigma.htm/20/05/2008/16:23>.
- Idi, Abdullah. 1999. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Ihsan, Hamdani. *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).
- Jalāl, 'Abd al-Fataḥ. 1998. *Min al-Ushul al-Tarbawiyah fi al-Islam*, terj. Herry Noer Ali, "Azaz-Azaz Pendidikan Islam" (Bandung: Dipenogoro).
- Jalaluddin Said, Usman. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Jalaluddin. 2001. *Teologi Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Juhaya. 2008. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika* (Jakarta: Kencana).
- Kasule, Omar Hasan. 2009. *Epistemologi Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan pada Universitas Islam: Epistemologi Islam dan Proyek Kurikulum*. (Makalah tidak diterbitkan: Dipresentasikan dalam Seminar Internasional di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 7 Februari).
- Langgulung, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. (Bandung: Al-Ma'arif).
- _____.1992. *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna).
- al-Maraghī. Mustafā. *Tafsīr al-Maraghī*, Juz I, (Libanon: Dār al-Ihyā', t.th.).
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Serasin)
- Muhaimin, *et.al.*, 2002. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Muhaimin. Mujib, Abdul. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya* (Bandung: Irgenda Karya).
- Muhammad, al-Shaibani, al-Toumi Omar. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Mustansyir, Rizal. Munir, Misnal. 2001. *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Mustafā. al-Ghalayaini. *'Iddat al-Nāshi'in*. (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Nabhan, t.th).
- Nizar, Syamsul. *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Priatna, Tedi. 2004. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam; Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy).
- Putri Manroe, Inda. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Greisinda Press, t.th).
- al-Qasimī, Muhammad Jamal al-Dīn. *Tafsīr Mahāsin al-Ta'wīl*, Juz I (Libanon: Dar al-Ihya', t.th)

- al-Qazwanī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Vol.1. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. (Jakarta: Erlangga).
- Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*, Juz XV, (Libanon: Dār al-Ihyā’, t.th).
- Rosyadi, Khoiron. 2004. *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Putaka Pelajar).
- S. Praja, Sudarsono. 1993. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta).
- S. Praja, Sudarsono. 1993. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan).
- Shofan, Moh. 2004. *Pendidikan Berparadigma Profetik; Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam* (Jogjakarta:UGM Press Jawa Timur).
- Singarimbun, Masri dkk. 1982. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3S).
- Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius).
- Suhartono, Suparlan. 2008. *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar. Ruzz Media).
- Suriasumantri, Jujun S. 1998. *Penelitian Ilmiah; Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa bekerjasama dengan Pusjarlit Press).
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Tim Penyusun, 2001. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*. Jilid 6., 2001, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove).
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003 (Bandung: Penerbit Citra Umbara).
- Wahyudi, Imam. 2007. *Pengantar Epistemologi* (Yogyakarta: Filsafat UGM).
- Yahya, Yudrik. 2004. *Wawasan Kependidikan*. (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Diknas).
- Yasin, A. Fatah. 2008. *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*. (Malang: UIN Malang Press).

Yunus, Mahmud 1990. *Kamus Arab- ndonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung).

Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara).